

EFEKTIVITAS TATA KELOLA OBYEK WISATA HUTAN MANGROVE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA APAR KOTA PARIAMAN

Hendri Tiawarman^{1(a)}, Adil Mubarak^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}hendritiawarman1712@gmail.com, ^{b)}adilmubarak@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

05-08-2023

Diterbitkan Online:

30-09-2023

Kata Kunci:

Efektivitas, Tata Kelola, Obyek Wisata, Hutan Mangrove, Peningkatan Ekonomi, Masyarakat

Keywords:

Effectiveness, Governance, Tourism Objects, Mangrove Forests, Economic Development, Community

Corresponding Author:

hendritiawarman1712@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Pariaman. Latar belakang penelitian ini adalah pengelolaan obyek wisata hutan mangrove oleh BUMDes yang belum optimal serta tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Apar yang belum merasakan manfaat dari keberadaan obyek wisata hutan mangrove. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Pariaman belum efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat aspek-aspek efektivitas dan aspek peningkatan ekonomi yang belum terpenuhi dalam tata kelola obyek wisata hutan mangrove, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien yang belum terpenuhi secara efektif atau maksimal. Selanjutnya, berdasarkan komponen peningkatan ekonomi juga belum efektif. Hal ini berdasarkan aspek meningkatnya pendapatan daerah, aspek meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan aspek meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum semuanya masyarakat sekitar obyek wisata merasakan kenaikan pendapatan rata-rata mereka dan kesejahteraan hidup mereka. Serta dalam aspek mengurangi angka pengangguran juga belum terlalu efektif dikarenakan masih sedikitnya peluang kerja yang tersedia di obyek wisata hutan mangrove.

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the management of mangrove forest tourism objects in improving the economy of the people of Apar Village, Pariaman City. The background of this research is the management of mangrove forest tourism objects by BUMDes which is not yet optimal and the level of welfare of the people of Apar Village who have not benefited from the existence of mangrove forest tourism objects. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive qualitative methods. This study uses informant selection techniques using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the effectiveness of managing mangrove forest tourism objects in improving the economy of the people of Apar Village, Pariaman City, has not been effective. This is because there are still aspects of effectiveness and aspects of economic improvement that have not been fulfilled in the management of mangrove forest tourism objects, namely clarity of goals to be achieved, clarity of strategy for achieving goals, availability of facilities and infrastructure, implementation of effective and efficient tasks that have not been fulfilled effectively or optimally. Furthermore, based on the economic improvement component, it has not been effective either. This is based on the aspect of increasing regional income, the

aspect of increasing the average income of the community and the aspect of increasing the welfare of the community. As well as in the aspect of reducing unemployment rates it is also not very effective because there are still few job opportunities available in mangrove forest tourism objects.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i3.109>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam yang sangat beragam, mulai dari keindahan wisata, flora dan fauna. Melimpahnya sumber daya alam inilah yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, apabila mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat (Sukarnoto, 2020). Penjelasan arti pariwisata terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan, yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata bersifat multisektoral, yang artinya dilakukan oleh banyak pihak, dimana semua mempunyai kepentingan yang sama dan saling mendapatkan manfaatnya. Pariwisata juga bersifat multidimensional, dimana membutuhkan dukungan yang berasal dari segala aspek pandangan, pemahaman, dan ide atau pendapat yang berbeda-beda dari berbagai lintas sektoral. Hal ini baik dari pemerintah maupun non pemerintah, sehingga yang ditetapkan menjadi kebutuhan pokok dalam pariwisata (Isdarmanto, 2017: 3).

Bentuk-bentuk pariwisata yang tersebar di berbagai daerah dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan partisipasi dari masyarakatnya. Hal ini, terdapat pada Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan berbagai obyek wisata yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah obyek wisata yang ada di Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Pariaman, yaitu obyek wisata hutan mangrove. Obyek wisata ini terletak di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.



Gambar 1. Obyek Wisata Hutan Mangrove Desa Apar

Pengembangan obyek wisata hutan mangrove Desa Apar ini, terdapat peran dari beberapa *stakeholder* yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) Apar mandiri yang berada di bawah kepemimpinan Kepala Desa Apar. Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman berperan memajukan pariwisata Kota Pariaman sebagai pelaksana kewenangan otonomi daerah yang meliputi perencanaan, promosi dan kerjasama, pembinaan dan pelestarian budaya serta pembenahan sarana dan prasarana di obyek wisata. Melalui tata kelola yang dilakukan oleh BUMDes Apar Mandiri dan *stakeholder* terkait ini, obyek wisata hutan mangrove secara umum, diharapkan dapat memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Adanya obyek wisata hutan mangrove dapat menjadi destinasi yang menarik kunjungan wisatawan, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperluas sektor jasa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata.

Obyek wisata hutan mangrove ini di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pariaman melalui keputusan Walikota Pariaman No 32 tahun 2019 Tentang Desa Wisata, yang mana didalamnya termasuk salah

satunya menetapkan Desa Apar menjadi desa wisata. Selanjutnya, obyek wisata hutan mangrove ini diharapkan sebagai obyek ekowisata yang tidak hanya menyajikan keindahan alam, namun juga sebagai obyek wisata yang merepresentasikan kondisi *local wisdom* dan kekayaan alam yang unik.

Obyek wisata dinilai tidak hanya dari segi keindahan dan kondisi obyek wisata, namun juga dilihat dari fasilitas, pelayanan jasa, pemasaran, dan aksesibilitas yang menjadi penunjang bagi pengunjung. Selain ketersediaan fasilitas dan kualitas pelayanan, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan di area obyek wisata juga hendaknya diperhatikan untuk menghindari terjadinya hal yang tak di inginkan (Kurnia, 2022). Obyek wisata hutan mangrove berperan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan baik bagi masyarakat, swasta dan pemerintah. Khususnya bagi pemerintah untuk memperoleh devisa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Maka dari itu, obyek wisata hutan mangrove dijadikan salah satu sumber pemasukan Desa Apar yang dikelola oleh BUMDes Apar Mandiri. Pelaksanaan tata kelola obyek wisata ini berpedoman pada Perdes Apar Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Wisata Apar.

Namun, hingga saat ini masih banyak wisatawan yang belum mengetahui keberadaan obyek wisata hutan mangrove. Hal ini dikarenakan pihak pengelola belum maksimal dalam mempromosikan obyek wisata. Pelaksanaan tata kelola wisata hutan mangrove saat ini, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang di sampaikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Bahwasanya tujuan dari konservasi dan wisata hutan mangrove ini yaitu untuk menjadi media edukasi dan konservasi mangrove, serta juga sebagai peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Namun, hal ini belum terlaksana dengan efektif dan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam tata kelola wisata hutan mangrove masih terdapat hambatan atau kendala seperti, sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai secara maksimal dan SDM yang ada belum mampu optimal dalam melakukan tugasnya, serta kurangnya koordinasi antara pengelola dengan pengawas dalam pengembangan obyek wisata hutan mangrove Desa Apar, serta masyarakat sekitar yang secara signifikan belum merasakan

manfaat dari kehadiran obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mencoba menggambarkan, menuturkan, menafsirkan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang (Moleong, 2012). Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Kantor Desa Apar, Kantor BUMDes dan POKDARWIS Apar serta juga dilakukan di sekitar obyek wisata hutan mangrove. Informan penelitian yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. Data yang didapatkan dengan cara melakukan suatu observasi (pengamatan), wawancara serta studi dokumentasi. Uji keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Pariaman.

Efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adalah hal ini menurut Gibson dalam S.P. Siagian (Nurhasana : 2020) menjelaskan ada beberapa aspek-aspek atau kriteria untuk menentukan efektif atau tidaknya , yaitu :

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Menurut Sondang P. Siagian (1978), dalam bukunya, pencapaian tujuan yang hendak dicapai merupakan keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Untuk menentukan efektivitas dapat dilihat dari salah satu aspek kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini maksud dan tujuan dari tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar yaitu untuk menata

dan mengelola potensi dan sumber daya desa di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dilapangan, tujuan dari tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar ini dapat disimpulkan belum efektif, karena pengelola terutama BUMDes dan POKDARWIS belum memahami tujuan secara keseluruhan berdasarkan ketetapan yang telah tertuang dalam Perdes Apar No 04 2019. Serta masyarakat sekitar obyek wisata yang hanya sedikit memahami apa tujuan dari obyek wisata ini dan hanya Kepala Desa Apar yang lumayan memahami terkait tujuan ini dikarenakan beliau berpatokan dengan Perdes yang menjadi pedoman dalam tata kelola obyek wisata.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Kejelasan strategi dalam proses pencapaian tujuan adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kejelasan strategis adalah "jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa kejelasan strategi dalam tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbedanya penyampaian yang informan sampaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Perdes, dan hanya beberapa poin saja yang pengelola terapkan yaitu poin nomor 2 dan nomor 4. Disini dapat kita lihat bahwa dari hasil wawancara dengan informan mereka hanya terfokus dalam peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta kolaborasi dan promosi. Jika berpedoman pada *masterplan* ataupun ketentuan awal ada beberapa strategi lain seperti pengidentifikasian nilai-nilai budaya dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.

c) Proses analisa dan perumusan kebijakan/keputusan yang mantap

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani

tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa perumusan kebijakan perilaku dari sebuah organisasi dalam memberikan bimbingan dan berfikir dalam menentukan sebuah keputusan yang akan diambil.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa proses analisa dan perumusan kebijakan tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari aturan atau keputusan yang mengatur terpusat mulai dari UU No 10 tahun 2009 tentang Pariwisata, Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan selanjutnya Perwako Pariaman No 13 tahun 2019 serta Perdes Apar No 3-5 yang dijadikan acuan dan pedoman dalam tata kelola obyek wisata. Serta ketika hendak mengambil Keputusan dalam tata kelola juga dilakukan melalui forum musyawarah bersama yang melibatkan *stakeholder* terkait sehingga mempunyai keputusan yang menjembatani pelaksanaan.

d) Kemampuan merumuskan perencanaan yang matang

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. Berdasarkan pendapat diatas perencanaan yang matang merupakan sebuah keputusan yang matang tentang sesuatu hal yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang maupun dimasa sekarang yang diharapkan tujuan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, perumusan perencanaan yang matang dalam tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dikarenakan kesiapan pengelola dan pihak terkait dalam merumuskan perencanaan yang matang untuk masa yang akan datang atau perencanaan jangka panjang. Dimana pengelola dan pihak terkait telah menyiapkan *master plan* yang akan mereka jadikan pedoman dalam tata kelola obyek wisata.

e) Tersedianya sarana dan prasarana

Merupakan salah satu aspek efektivitas agar kemampuan bekerja secara produktif. melalui sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Secara etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, sedangkan

sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar belum mencukupi atau belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya fasilitas yang harus ada di obyek wisata berdasarkan Permen Pariwisata No 03 tahun 2018 yang belum tersedia di obyek wisata hutan mangrove ini. Seperti belum tersedianya mushola, kurangnya jumlah toilet, lampu taman, pagar pembatas. Serta kurangnya perawatan akan fasilitas yang sudah ada saat ini menjadi kurangnya daya tarik wisatawan.

f) Pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien

Pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien, sebisa mungkin suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak akan mencapai sasaran, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan. Tujuan yang jelas, strategi yang tepat, proses yang efektif, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana dalam program dan memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas masih harus ditunjukkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien dari tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar belum efektif. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyaknya kendala-kendala yang dialami pengelola dalam melakukan tata kelola obyek wisata hutan mangrove.

g) Pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian dalam aspek efektivitas yang dikemukakan James L. Gibson merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan aspek terakhir yang dinilai dalam menentukan keefektifitasan.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian mendidik terkait dalam tata kelola obyek wisata hutan mangrove yang dilakukan oleh pihak pengawas yakni Kepala Desa Apar dan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kota Pariaman dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari rutin dan konsistennya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan, serta adanya pelaporan baik tertulis maupun tidak dari pengelola ke pihak pengawas.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Apar melalui Tata Kelola Obyek Wisata Hutan Mangrove

Menurut Suparmoko (Zulfa, 2016), untuk mengetahui peningkatan ekonomi dapat menggunakan empat komponen pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi tingkat pengangguran.

a) Meningkatkan pendapatan daerah

Dalam melihat apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkembang ke arah yang lebih baik, cukup dengan membandingkan periode tertentu dengan periode sebelumnya. Jika nilai produk nasional bruto meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan, dengan adanya tata kelola obyek wisata hutan mangrove Desa Apar dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Pariaman belum ada. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya kunjungan wisata dan pendapatan yang belum stabil dari obyek wisata hutan mangrove, serta masih fokus penggunaan pendapatan wisata ini untuk pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di obyek wisata. Namun apabila nantinya pendapatan sudah stabil, pengelola wajib menyetorkan sebesar 10 persen dari pendapatan obyek wisata ke kas daerah Kota Pariaman.

b) Meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat

Aspek pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah pendapatan per kapita (pendapatan rata-rata). Pendapatan per kapita sendiri merupakan pendapatan rata-rata masyarakat daerah atau juga sering disebut sebagai aspek kemakmuran daerah. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun, maka pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan juga meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa dengan adanya tata kelola obyek wisata hutan mangrove saat ini, belum

signifikan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat sekitar obyek wisata hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman. Namun, jika dibandingkan dengan sebelum adanya obyek wisata lumayan ada perubahan. Sampai saat ini untuk meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat masih dalam proses, karna belum semuanya masyarakat merasakan kenaikan pendapatan rata-rata mereka.

c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan pendapatan riil per kapita, terutama dalam distribusi barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi di dalam daerah, maka berdampak pada pendapatan per kapita yang juga merata di seluruh wilayah, dengan demikian, peningkatan kesejahteraan dapat dipastikan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu proses dan tujuan dalam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa dengan adanya tata kelola obyek wisata hutan mangrove belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Apar secara keseluruhan, karna saat ini belum semua masyarakat merasakan dampak dari adanya obyek wisata ini, serta hanya sebagian masyarakat saja yang merasakan peningkatan ekonomi yang berdampak dalam kesejahteraan mereka.

d) Mengurangi tingkat pengangguran
Pertumbuhan ekonomi daerah yang membaik juga tercermin dari ketersediaan peluang atau kesempatan kerja, dimana penyerapan jumlah tenaga kerja mengurangi tingkat pengangguran. Ini juga meningkatkan produktivitas daerah. Berdasarkan temuan penelitian lapangan didapatkan hasil bahwa dalam tata kelola obyek wisata hutan mangrove belum efektif mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang terserap dari adanya obyek wisata ini masih sedikit, serta belum maksimalnya masyarakat yang diberikan fasilitas dan tempat berdagang dalam menggunakannya. Namun, secara perlahan telah mengurangi angka pengangguran di Desa Apar. Saat ini pengelola sedang mengusahakan agar bisa lebih banyak masyarakat yang dapat berkerja di obyek wisata ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Pariaman, maka dapat peneliti simpulkan bahwa efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Pariaman bisa dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya 7 aspek-aspek efektivitas tata kelola dan 4 aspek peningkatan ekonomi. Berdasarkan 7 aspek-aspek untuk menentukan keefektivitasan, dimana hanya aspek proses analisa dan perumusan kebijakan/keputusan yang mantap, aspek kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang serta aspek pengawasan dan pengendalian yang mendidik yang efektif. Sedangkan beberapa aspek lainnya seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, ketersediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien yang belum efektif atau maksimal.

Selanjutnya, berdasarkan aspek peningkatan ekonomi juga belum efektif. Hal ini berdasarkan 4 komponen peningkatan ekonomi tidak adanya komponen yang tercapai secara efektif atau maksimal, yaitu seperti aspek meningkatnya pendapatan daerah, serta dalam meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan aspek meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum semuanya masyarakat sekitar obyek wisata merasakan kenaikan pendapatan rata-rata mereka dan kesejahteraan hidup dan dalam mengurangi angka pengangguran juga belum terlalu efektif dikarenakan masih sedikitnya peluang kerja yang tersedia di obyek wisata hutan mangrove. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka efektivitas tata kelola obyek wisata hutan mangrove dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Apar Kota Pariaman belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelola Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara dan STiPrAm.
- Kurnia, O. (2022). Pengaruh kualitas paket wisata terhadap tingkat kepuasan wisatawan di kawasan Tanjung Lesung

- Pandeglang Banten. *Jurnal Manner*, 1(2), 96-103.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasana, A., & Frinaldi, A. (2020). Efektivitas Penggunaan Sistem Aplikasi Otentikasi Penerima Pensiun PT. TASPEN Secara Digital dengan Menggunakan Smartphone di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 16-25.
- Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Wisata Apar.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata.
- S.P. Siagian. (1978). *Manajemen*. Yogyakarta: Liberty,
- Sukarnoto, T. (2020). Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Peluang Bisnis di Era Revolusi Industri 4.0 Desa Patuanan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. *Etos*, 2(2), 89-96.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Merupakan Instrumen Pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Zulfa, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kota lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*. Vol. 5(1).